

INTERVIEW GUIDE

PENGELOLAAN ISU HUMAS PEMERINTAH KOTA

YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN RELOKASI AREA

PARKIR MALIOBORO TAHUN 2016

A. Pertanyaan untuk Humas Pemerintah Kota Yogyakarta

1. Bagaimana posisi humas di pemerintah kota Yogyakarta?
2. Bagaimana peran humas di pemerintah kota Yogyakarta? Apakah humas berperan secara teknis atau strategis?
3. Bagaimana rencana kerja humas pemerintah kota Yogyakarta pada periode sekarang?
4. Bagaimana pengelolaan isu yang dilakukan oleh humas pemerintah kota Yogyakarta secara umum?
5. Apa tanggapan humas pemerintah kota Yogyakarta terhadap pemberitaan penolakan relokasi parkir malioboro di media massa? Apa pengaruh pemberitaan tersebut terhadap pemerintah?
6. Bagaimana hubungan antara humas dengan komunitas PPAMY selaku salah satu masyarakat terdampak relokasi?
7. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro dilakukan tanggal 4 April 2016?
8. Bagaimana pengelolaan isu humas pemerintah kota Yogyakarta terkait relokasi parkir Malioboro terhadap juru parkir PPAMY? Bagaimana peran humas dalam pengelolaan isu tersebut?
9. Bagaimana identifikasi isu yang dilakukan humas pemerintah kota Yogyakarta dalam penanganan relokasi area parkir malioboro?
10. Bagaimana analisis isu yang dilakukan humas pemerintah kota Yogyakarta dalam penanganan relokasi area parkir malioboro?
11. Apa strategi yang dipilih humas pemerintah kota Yogyakarta dalam melakukan pengelolaan isu relokasi parkir Malioboro?
12. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan isu humas pemerintah dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro?

13. Bagaimana program penanganan isu yang dilakukan humas pemerintah kota Yogyakarta dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro?
14. Apakah dalam penanganan isu relokasi parkir Malioboro humas pemerintah kota Yogyakarta melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah lain (Asisten perekonomian dan pembangunan, Dinas pariwisata Yogyakarta)?
15. Bagaimana humas pemerintah kota Yogyakarta memposisikan media dalam pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro?
16. Bagaimana evaluasi hasil yang dilakukan dalam pengelolaan relokasi parkir Malioboro? Apakah telah sesuai dengan tujuan humas pemerintah?
17. Apakah masih ada pengelolaan isu yang dilakukan humas pemerintah pasca relokasi area parkir malioboro?
18. Apakah pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro memiliki hubungan dengan UU keistimewaan D.I.Y ?
19. Apakah pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro memiliki hubungan dengan Pergub Nomer 10 Tahun 2015 tentang *Brand/Logo* D.I.Y?
20. Apakah pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro memiliki hubungan dengan penggalangan dukungan politik dari PPAMY?
21. Apa faktor pendukung bagi humas pemerintah kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pengelolaan isu relokasi parkir Malioboro?
22. Apa faktor penghambat bagi humas pemerintah kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pengelolaan isu relokasi parkir Malioboro?

B. Pertanyaan untuk Ketua PPAMY (masyarakat penolak isu)

1. Bagaimana tanggapan anda tentang pemberitaan tentang penolakan relokasi area parkir malioboro?
2. Bagaimana tanggapan anda tentang pemberitaan tentang tanggapan Sri Sultan Hamengku Buwana X mendukung relokasi area parkir?
3. Bagaimana pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro pada tahun 2016?
4. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi relokasi area parkir Malioboro yang diadakan pemerintah kota Yogyakarta? Bagaimana pelaksanaan sosialisasi tersebut?
5. Apakah humas pemerintah kota Yogyakarta berperan aktif dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro?
6. Selain humas pemerintah, siapa pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro?
7. Bagaimana Penanganan humas pemerintah kota Yogyakarta dalam relokasi area parkir Malioboro?
8. Apakah humas pemerintah kota Yogyakarta dapat menampung aspirasi anda terkait relokasi area parkir Malioboro?
9. Apakah tindakan yang dilakukan oleh humas pemerintah kota Yogyakarta dalam menangani relokasi area parkir Malioboro telah sesuai dengan harapan anda?
10. Apakah solusi yang diberikan pemerintah kota Yogyakarta telah sesuai dengan kebutuhan anda?
11. Apa harapan anda dengan menolak relokasi area parkir Malioboro?
12. Apa harapan anda bagi pemerintah kota Yogyakarta pasca relokasi area parkir Malioboro?
13. Apakah paguyuban yang anda ikuti mendukung salah satu partai politik yang ada di Yogyakarta?

C. Pertanyaan untuk masyarakat Malioboro (masyarakat pendukung isu)

1. Bagaimana tanggapan anda tentang pemberitaan tentang penolakan relokasi area parkir malioboro?
2. Bagaimana tanggapan anda tentang pemberitaan tentang tanggapan Sri Sultan Hamengku Buwana X mendukung relokasi area parkir?
3. Bagaimana pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro pada tahun 2016?
4. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi relokasi area parkir Malioboro yang diadakan pemerintah kota Yogyakarta? Bagaimana pelaksanaan sosialisasi tersebut?
5. Apakah humas pemerintah kota Yogyakarta berperan aktif dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro?
6. Selain humas pemerintah, siapa pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro?
7. Bagaimana Penanganan humas pemerintah kota Yogyakarta dalam relokasi area parkir Malioboro?
8. Apakah humas pemerintah kota Yogyakarta dapat menampung aspirasi anda terkait relokasi area parkir Malioboro?
9. Apakah tindakan yang dilakukan oleh humas pemerintah kota Yogyakarta dalam menangani relokasi area parkir Malioboro telah sesuai dengan harapan anda?
10. Apakah solusi yang diberikan pemerintah kota Yogyakarta telah sesuai dengan kebutuhan anda?
11. Apa harapan anda dengan mendukung relokasi area parkir Malioboro?
12. Apa harapan anda bagi pemerintah kota Yogyakarta pasca relokasi area parkir Malioboro?
13. Apakah paguyuban yang anda ikuti mendukung salah satu partai politik yang ada di Yogyakarta?

Nama : Ignatius Trihastono, S.Sos.

Jabatan: Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi

B. Pertanyaan untuk Humas Pemerintah Kota Yogyakarta

1. Bagaimana posisi humas di pemerintah kota Yogyakarta?

“Humas merupakan salah satu SKPD atau unit kerja yang berada dibawah sekretaris daerah, jadi kalo kita bicara SKPD, SKPD itu adalah edisi sebelum 1 Januari 2017 ada yang namanya bagian yang fungsinya adalah membantu sekretaris daerah. Ada yang namanya kantor, kantor itu tidak berada dibawah Sekda, ada yang namanya Dinas tidak berada dibawah Sekda, ada yang namanya badan. Kalo lokus bagian humas dan informasi tadi karena sifatnya adalah pembantu sekretaris daerah sehingga kegiatannya dominannya adalah pelayanan internal. Jadi yang namanya bagian itu adalah dominannya pelayanan internal pada walikota, pimpinan yang lain da juga SKPD yang lain dalam konteks hal ini adalah pada aspek informasi arus informasi. Bicara tentang arus informasi itu ada dua, satu arus informasi keluar sebagai bentuk bagaimana kemudian agar produk-produk kebijakan dan produk-produk apapun itu dari pemerintah kota Yogyakarta bisa tersampaikan ke publik dan masyarakat bisa menerimanya secara jernih, jernih itu ya jelas tidak bias dan lain sebagainya. Yang kedua adalah melakukan dan mengelola arus masuk informasi secara aktif artinya ini menyerap informasi dari masyarakat, masyarakat itu bukan berarti masyarakat secara umum masyarakat luas tetapi juga masyarakat sektentatif seperti media baik itu media mainstreaan ataupun sosial media sehingga menjadi kewajiban kita adalah setiap hari mencermati media dan mencermati aspirasi publik dan juga kemudia kita mengelola apa yang dinamakan keluhan publik, aspirasi publik, keluhan-keluhan publik dan lain sebagainya. Itu ketugasan kita dan posisi kita.”

2. Bagaimana peran humas di pemerintah kota Yogyakarta? Apakah humas berperan secara teknis atau strategis?

“Dua duanya, ada aspek *support* kebijakan dan juga ada aspek teknis artinya kan *support* kebijakankan itu strategis lalu apa bentuknya yaitu produk-produk telaah informasi kita setiap hari senin itu digunakan sebagai bahan rapat koordinasi terbatas oleh walikota. Jadi itu aspek strategisnya. Aspek teknisnya kita harus melayani alur komunikasi keluhan publik, harus memberikan akses dan konten informasi kepada masyarakat, mengelola mengidentifikasi dan menginput informasi rumor isu polemik yang ada dimasyarakat. Kita juga membuat yang namanya telaah media, Telaah media sebetulnya adalah analisis sederhana dari apa yang ada di media. Trennya seperti apa, aspek sensitifnya bagi pemkot seperti apa, apakah itu berdampak negatif atau positif terhadap pemkot, kalo itu berdampak negatif apa yang harus kita lakukan. Itu kita susun dalam format telaah kepada pimpinan. sampai kemudian bagaimana pimpinan harus bersikap memberikan statement atau pasif diam, biar saja isu itu mengelinding dan selesai itu fungsi dari hasil-hasil klipng atau telaah.”

3. Bagaimana rencana kerja humas pemerintah kota Yogyakarta pada periode sekarang?

“Jadi ada yang namanya perencanaan jangka panjang dua puluh lima tahunan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, kemudian breakdownnya setiap tahun adalah rencana kegiatan. Kebetulan di 2017 ini keberadaan bagian humas dan informasi hilang menjadi nanti dijadikan satu dengan bagian lain teknologi informasi menjadi Dinas komunikasi informasi dan persandian, nah apa yang akan kita lakukan 2017, nanti anda pinjam RKA nya di pak Ageng.”

4. Bagaimana pengelolaan isu yang dilakukan oleh humas pemerintah kota Yogyakarta secara umum?

“Ya itu adalah fungsi humas dan fungsi promosi publikasi, jadi humas itu juga itu tadi mengelola isu, *manage* isu, bahkan kadang-kadang membangun isu juga.”

5. Apa tanggapan humas pemerintah kota Yogyakarta terhadap pemberitaan penolakan relokasi parkir malioboro di media massa? Apa pengaruh pemberitaan tersebut terhadap pemerintah?

“Itu adalah sikap yang sangat wajar bagi kami, ada kecemasan dari temen-temen parkir kemudian mereka punya aspirasi, mereka punya kekhawatiran-khawatiran mungkin penjelasan yang kami sampaikan kurang jelas atau jelas tapi ada *gap* orientasi, arah kebijakannya seperti ini mereka punya ekspektasi seperti ini. Jelas ini bukan sesuatu yang kemudian mudah ya kami mengerti kami akan mengikuti itu tidak seperti itu. Sehingga kemudian yang namanya mereka berpendapat, mereka kemudian menyampaikan pendapat itu ke Dewan, menyampaikan pendapat itu ke media mereka tidak 100 persen bisa menerima kebijakan itu sesuatu yang naluriah sesuatu yang wajar. Bisa kita simpulkan sebetulnya kebijakan pemerintah dalam hal penataan malioboro *progress* pertama atau tahap pertama dengan memindahkan aktifitas perparkiran dari sepanjang tepi jalan malioboro ke tempat parkir abu bakar ali atau malioboro 2, itu sebetulnya mewakili harapan publik pada umumnya. Harapan publik itu adalah harapan masyarakat diluar mereka yang berkepentingan dengan malioboro, masyarakat akan melihatnya dan mendudukkan dalam konteks yang lebih objektif bahwa malioboro harus menjadi tempat yang lebih nyaman untuk bisa di nikmati, tidak *crowded* seperti itu, tidak semrawut seperti itu. Jadi kalo kita bicara pada saat itu bagaimana arah media memberitakan kejadian-kejadian yang ada disepertaran relokasi atau saya katakan penataan parkir itu ada dua hal, yang satu adalah fakta bahwa ada keresahan di teman-teman juru parkir sedikit ada penolakan, ada aktifitas-aktifitas “demo” misalnya ke dewan ke balaikota itu fakta dan media pasti akan mendudukkan fakta itu sebagai hal yang objektif. Tetapi diluar hal itu ada juga ekspektasi publik dan juga kemudian pendapat media yang menyampaikan bahwa penataan ini memang dibutuhkan malioboro yang lebih nyaman memang dibutuhkan. Karena malioboro adalah wajah utama kota Yogyakarta dan wajah utama DIY, itu dibutuhkan. Dan apa yang terjadi saat ini ketika kemarin menjelang akhir tahun baru ketika wajah baru malioboro di *launching* kan masyarakat antusias bukan hanya masyarakat umum yang

langsung duduk disana tetapi juga media-media antusias. Pelaku pelaku pariwisata mengapresiasi, jadi bukan tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan sebetulnya pada pemberitaan-pemberitaan diseputar penataan malioboro saat itu.”

6. Bagaimana hubungan antara humas dengan komunitas PPAMY selaku salah satu masyarakat terdampak relokasi?

“Tentunya hubungan kami tidak teknis ya, kami tidak melakukan hubungan yang terkait dengan pengelolaan, dengan masalah sosial, dampak sosial dan ekonomi mereka tetapi kami lebih membantu kepada SKPD-SKPD yang terkait dengan itu misalnya UPT Malioboro, Dinas Pariwisata, dan beberapa SKPD yang terkait dengan hal itu sehingga kebijakan-kebijakan teknis dari masing-masing SKPD itu relatif lebih bisa efektif diterima mereka. Bukan kami memakai perpanjangan tangan mereka, dinas yang kami sebutkan tadi itu lebih berkompeten untuk bicara secara teknis terkait dengan perparkiran, disana kemudian ada paguyuban, paguyuban itu yang mensupport adalah UPT yang mensupervisi ada UPT kemudian paguyuban itu di *backup* oleh UPT jangan sampai mereka tergusur oleh pemain parkir yang mereka diluar paguyuban. Titik itu sebetulnya seksi untuk dikelola secara profesional oleh pihak ketiga. Bagi pemerintah secara potensi itu lebih terjamin karena pasti, tetapi kami mempunyai komitmen juga bahwa mereka yang beraktifitas parkir disana itu harus terjamin, selama mereka masih menggeluti aktifitas itu secara formal mereka akan dilindungi untuk bisa mengelola itu secara paguyuban, bahkan kalo memungkinkan secara ekonomi bagaimana kemudian agar masyarakat itu kemudian masyarakat terbiasa agar kalo ke malioboro parkirnya ya di abu bakar ali itu tidak di tempat lain. Itu menjadi upaya-upaya dari teman-teman teknis di lapangan. Jadi jangan dibalik ya, komunikasi bukan fungsi utama dalam konteks penataan malioboro, tetapi komunikasi adalah fungsi penunjang. Jadi fungsi utamanya adalah teknis sangat teknis.”

7. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro dilakukan tanggal 4 April 2016?

“Ada aspek filosofis, aspek teknis, aspek ekonomis, aspek estetika banyak sekali. Aspek teknis misalnya yang namanya parkir ditepi jalan umum adalah kegiatan yang sebetulnya tidak dikehendaki tetapi dibutuhkan, pada toleransi tertentu itu masih dibutuhkan untuk dilaksanakan. Tetapi kalo njenengan lihat dari beberapa waktu yang lalu dari pasar bringharjo sampai depan hotel garuda itu menjadi tempat *showroom* kendaraan bekas terpanjang di asia, ya to kalo itu dikatakan *showroom* ya padahal itu ruang bahu jalan yang sebetulnya fungsinya adalah sebagai tempat lalu lalang publik pejalan kaki *non* kendaraan. Yang kedua aspek estetika malioboro adalah wajah kota yogyakarta wajah DIY ikon jogja apa ya kita tidak ingin membuat malioboro nyaman untuk *kongkow-kongkow* sebagai ruang publik besar. Aspek filosofis misalnya jalan malioboro adalah penggal jalan yang merupakan garis imajiner filosofis kraton, merapi, tugu, jalan margo mulyo, jalan malioboro, jalan margo utomo, pangurahan, kraton, panggung krapyak, laut selatan, secara filosofis. Menjadi tidak etis juga ketika filosofis ini terkontaminasi oleh hal-hal yang kemudian menghilangkan roh atau rasa bahwa itu sebetulnya bukan jalan sebatas seperti jalan yang lain tetapi itu adalah jalan

yang mengandung makna karena terkait dengan keistimewaan jogjakarta, itu secara filosofis. Secara ekonomi malioboro itu kecil hanya 750an meter persegi disana ada pusat perbelanjaan, ada pasar tradisional, dan lain sebagainya. Pada satu tingkat tertentu daya dukung ekonomi satu tingkatan itu akan mentok tidak akan mampu lagi untuk menampung sehingga apa yang harus dilakukan mengupgrade, meningkatkan daya dukung tadi. Oh berarti malioboro menjadi satu titik ekonomi yang maha liar iya *premium* iya jadi itu secara ekonomi. Bagaimana caranya yaitu kekumuhan itu harus dihilangkan, apakah itu berhenti pada saja tidak. *Njenengan* masih melihat kekumuhan-kekumuhan yang lain masih melihat perilaku juga bahwa semua masyarakat malioboro, pelaku ekonomi malioboro semuanya siap mengubah wajah malioboro yang itu kemudian diikuti dengan perilakunya. Contohnya kemarin di sosial media marak mas boni telo *upload* bagaimana seorang pedagang dengan enaknyanya membuang limbah cucian itu ke *telasar* itu. Artinya apa perilaku masyarakat belum siap nah itu secara ekonomi berbicara masalah penataan. Artinya penataan malioboro itu bukan hanya sekedar kebijakan yang hanya coba-coba saja banyak orang mengatakan bahwa itu kebijakan karena pemda DIY turah duit kebanyakan duit dari dana keistimewaan. Penataan malioboro adalah program yang sangat terkonsep, ini belum selesai nanti pasti akan ada penataan penataan lain sehingga benar-benar nyaman. Kita juga sangat menghormati dinamika sosial yang terbangun disana dan kemudian dinamisasinya seperti apa, kita tidak mau cuma sekedar memaksakan pengat tanggal saja sementara aspek-aspek sosialnya itu kemudian belum cun begitu, *apasih* artinya dari pada tanggal-tanggal sekian tapi kemudian kontrakasinya terlalu tinggi toh kemudian itu diundur menjadi tanggal 4 itu kan tidak ada reaksi apa-apa yang kemudian cukup signifikan misalnya ada penolakan atau apa semuanya berjalan *smooth*.”

8. Bagaimana pengelolaan isu humas pemerintah kota Yogyakarta terkait relokasi parkir Malioboro terhadap juru parkir PPAMY? Bagaimana peran humas dalam pengelolaan isu tersebut?

“Diluar hal-hal yang bersifat *news*, kami juga secara informal melakukan diskusi-diskusi dengan media bagaimana kita bisa menyampaikan kepada redaktur redaktur pelaksana *apasih* sebetulnya tujuan latarbelakang dan arah dari penataan malioboro itu. Jadi kita *pengen* memberikan referensi yang objektif luas kepada media sehingga ketika kemudian mereka menyampaikan kepada publik itu kemudian tidak sekedar memotret fakta memotret kejadian tidak, tetapi mereka paham oh ini sebagai akibat dari reaksi dari kebijakan itu tetapi kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat bisa diterima bukan kebijakan sepihak saja yang kemudian hanya seolah-oleh coba-coba, ini adalah kebijakan yang oleh masyarakat jogjakarta, oleh kota jogjakarta, oleh pemerintah provinsi dibutuhkan. *Nah* tapikan ketika ada respon dari si pelaku itu kan fakta tapi kemudian tidak hanya sekedar ditonjolkan fakta mereka menolak, pemerintah abai dan lain sebagainya tidak. Kami sampaikan juga aspek-aspek pengamanan sosial pada saat itu ada yang namanya kemudian dikenal sebetulnya *honor* tugas tapi kemudian petugas parkir mengistilahkan dengan “Jadup” selama dua bulan kan gitu *to*, kita sampaikan kita tidak abai ada aspek ini *lo* kami akan memberikan jaminan dengan bentuk *honor* agar laku tidak laku parkir itu pelaku parkir itu dapat *duit* untuk dibawa pulang, kami sampaikan seperti itu artinya kemudian mereka ada pemahaman *oh* iya ini fair ada kebijakan dan sadar ini akan

terjadi kontraksi sekian lama kemudian diantisipasi dengan jaring sosial seperti ini. Kalo ada penolakan dan pandangan yang lain wajar tapi ini adalah kebijakan yang sudah di antisipasi kami lakukan seperti itu. Yang intensif melakukan diskusi adalah UPT, kami melakukan secara informal dengan beberapa tokoh-tokoh parkir kami sampaikan menerima atau menolak program ini pasti akan jalan artinya sebetulnya diskusinya jangan diskusi pada konteks konsep kebijakan ini tapi konsep antisipasinya seperti apa.”

9. Bagaimana identifikasi isu yang dilakukan humas pemerintah kota Yogyakarta dalam penanganan relokasi area parkir malioboro?

“Ya yang pertama kita mengikuti apa yang tampak di media untuk melihat kira-kira ekskhalasi isu itu kemungkinan akan berkembang seperti apa, yang kedua secara informal kita juga menggali apa yang berkembang dinamika pemikiran dinamika berpendapat yang kemudian dimungkinkan berkembang langsung dari mereka-mereka yang langsung terkait penataan malioboro. Baik itu dari sisi komunitas petugas parkir dan dari teman-teman pengawal kebijakan teknis disana yaitu teman-teman UPT malioboro. *Nah* dari sana kemudian kita bisa membuat petanya. Isu yang dibangun akan seperti ini, konstruksi apa yang akan terjadi dimungkinkan seperti ini kemudian kami memberikan beberapa masukan terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi dalam konteks dialektika komunikasinya dialektika medianya.”

10. Bagaimana analisis isu yang dilakukan humas pemerintah kota Yogyakarta dalam penanganan relokasi area parkir malioboro?

“Semua hal yang terkait dengan pemerintah kota itu menjadi tanggung jawab kita. Tetap saya kaitkan dengan malioboro, Malioboro bergulir pada masa akhir jabatan beliau walikota terdahulu, itu menjadi isu karena banyak pihak mengatakan bahwa ini menjadi proyek mercusuar, proyek pertaruhan kalo berhasil jadi nilai kalau gagal akan menjadi nilai buruk bagi pengambil kebijakan saat itu akhirnya apa yang terjadi dimalioboro pun ada yang mengkaitkan dengan agenda pilkada, jadi banyak sekali isu-isu lain yang ada di kota jogja misalnya isu tentang perhotelan marak, bagaimana aspek jogja booming jadi tujuan traveling tapi secara infrastruktur belum siap buktinya setiap ada liburan natal dan tahun baru jogja macet, isu itu krusial tapi apakah isu itu kita *manage* melalui media? Tidak harus. Tapi minimal publik-pihak tertentu perlu tau, saya pernah menyampaikan diskusi internal dengan teman-teman redaktur kenapa hotel-hotal banyak muncul dikota jogja saya katakan itu dampak dari berkembangnya jogja. Dari *middle city* menjadi *metropolis city*. Apa contohnya *metropolis city* itu, sebentar lagi 2019-2020 akan dioprasionalkan bandara baru di kulon progo, gerbangnya dimana gerbang utamanya ya di stasion tugu, nanti dari sana naik kereta. Kecenderungan perilaku konsumen, kecenderungan perilaku publik juga menjadi perhitungan utama dalam kontek pengambilan kebijakan sehingga apa yang akan terjadi, sehingga tugu akan menjadi gerbang besar, gerbang tidak harus berbentuk dalam fisik tetapi kemudian bisa juga sampai boarding itu di tugu tinggal naik kereta disana tinggal masuk di terminalnya bisa seperti itu. *Njenengan* mau kebandara *njenengan* bisa membawa kendaraan ke tugu kemudian naik kereta yang langsung ke bandara. *Nah* dengan demikian nanti arus mobilitas publik itu tetep akan

tersentral di jogja naluri investasi pasti ada muncul lah investasi-investasi dalam bentuk hotel. Sebetulnya diskusinya jangan kok diskusi jogja asat atau sebagainya tapi bagaimana kemudian fenomena munculnya industri-industri besar dalam bentuk industri penunjang dalam industri pariwisata ini bisa ditangkap oleh kebijakan, kebijakannya sudah eksekusinya yang belum. Misalnya tidak mercoki sumber air tanah kemudian ya gunakan air PAM kan seperti itu, libatkan masyarakat sekitar jangan *ngundang* rombongan dari cino misalnya, jangan-jangan nanti masuk *ni* pekerja-pekerja cina masuk disektor perhotelan itu sebetulnya kemudian yang harus didiskusikan. Tapi kalo kemudian apakah di jogja butuh hotel iya, jogja itu adalah pilihan utama sekarang trennya adalah kalo ada *corporate* gede atau kementerian rapat pasti mengambil lokasi ditengah untuk memudahkan yang dari timur datang yang dari barat datang kalimantan datang simpulnya jogja solo pilihan tapi infrastrukturnya lebih siap di jogja dari pada solo, semarang tidak dilihat. Kenapa jogja, jogja punya *brand* nah dengan cara-cara itu sebetulnya kita bisa mendongkrak ekonomi masyarakat”

11. Apa strategi yang dipilih humas pemerintah kota Yogyakarta dalam melakukan pengelolaan isu relokasi parkir Malioboro?

“Memang kita berpesan kepada teman-teman pengawal kebijakan teknisnya agar jangan terlalu reaktif terhadap komentar-komentar, berita-berita terkait relokasi malioboro karena kami merasa bahwa pada *level* suasana seperti itu kalo kita tejabak pada dialektika yang saling bereaksi itu akan lebih memanaskan situasi tidak menjadi dingin, itu yang pertama. Jadi biarkan keresahan dari teman-teman saat itu petugas-petuga parkir itu tersempaikan toh semuanya terkanalisisasikan kepada jalur-jalur yang normatif mereka mengadu ke dewan, mereka menyampaikan ke balaikota, mereka menyampaikan ke media, itu menurut kami adalah jalur-jalur yang normatif seperti itu. Memang ada pihak-pihak luar yang masuk disana misalnya seperti lembaga pengabdian (LSM) kami pun membuka diri untuk berkomunikasi dengan mereka sehingga minimal mereka bisa tahu kenapa kebijakan itu bisa muncul, kenapa kemudian harus terlaksana itu mereka bisa tahu.”

12. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan isu humas pemerintah dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro?

“Ya dalam penanganan sebuah isu tentu hal yang ingin dicapai dari pengelolaan isu tersebut adalah meminimalisir *gap* orientasi, terciptanya kesepahaman antara pemerintah dan publik sehingga apa potensi kontraksi dari pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut dapat diredam. Misalnya bisa *njenengan* lihat pada waktu pemindahan parkir tanggal 4 april 2016 berjalan tanpa ada penolakan yang sempat dikhawatirkan selama ini terjadi, media juga meliputnya dengan *framing* positif.”

13. Bagaimana program penanganan isu yang dilakukan humas pemerintah kota Yogyakarta dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro?

“Ya yang jelas yang pertama membangun komunikasi, karena bukan hal yang gampang ketika berbicara tentang relokasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi sekelompok warga apapun itu. Aktivitas perparkiran menjadi penopang hidup bagi kurang lebih sekitar 270 orang. Wajar kalo kemudian muncul kekhawatiran, apakah nanti nasib saya nanti bisa memiliki aktifitas perparkiran di Malioboro, apakah program ini menjamin tetap saya bisa menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Suatu manusiawi kemudian banyak pandangan-pandangan yang tidak otomatis kemudian berbicara setuju ataupun tidak setuju. Tetapi permasalahan disini kan bukan kok kita hanya sekedar membuka forum dialog tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik kepada masyarakat pelaku aktifitas perparkiran ataupun masyarakat pada umumnya. Lalu yang kedua kita mengembangkan wacana yang ada di media baik media *mainstream* maupun dalam bentuk diskusi-diskusi adalah penataan disatu sisi juga adalah untuk mencukupi kebutuhan publik yang lebih adil bahwa fungsi trotoar fungsi bukan jalan memang adalah bukan milik publik untuk beraktifitas, bahwa difabel memiliki hak juga untuk menikmati malioboro dengan menggunakan sisi *non* badan jalan bahwa malioboro pasca penataan itu dipastikan akan lebih humanis lebih *friendly* lebih memberikan ruang untuk penjalan kaki, artinya ini adalah merupakan sebuah pengembalian ruang publik itu menjadi hak publik. Sehingga nantinya “konflik” cara pandang atau perbedaan cara pandang tidak mengerucut pada satu garis linier pelaku parkir dengan pemerintah kota, satu sisi pemerintah provinsi. Nah kemudian ini kan harus *dijembar ke*, ini bukan hanya perbedaan cara pandang pemkot dengan petugas parkir malioboro tapi ini juga adalah bentuk tanggung jawab pemerintah mengembalikan hak publik itu pada tempatnya, bahwa trotoar namanya atau plasa, emperan itu bukan milik *private* pelaku usaha parkir tapi milik publik yang bisa digunakan untuk melakukan mobilitas mereka. Ada juga yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memberikan pemahaman yang utuh kepada temen-temen media terkait dengan apa esensi dari penataan atau pengertian dari arti relokasi itu. Sehingga nanti temen-temen media tidak hanya sekedar menulis itu hanya pada kulit yang tampak saja tapi mereka paham kenapa pemkot bersikeras seperti ini kenapa provinis juga bersikeras seperti ini itu media menjadi paham. Ketika media menjadi paham kami yakin kemudian beritanya menjadi lebih berimbang tidak kemudian cenderung memanas-manasi atau provokasi malah.”

14. Apakah dalam penanganan isu relokasi parkir Malioboro humas pemerintah kota Yogyakarta melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah lain (Asisten perekonomian dan pembangunan, Dinas pariwisata Yogyakarta)?

“Sebetulnya malah di balik, domain dari pelaksana dan penanggung jawab teknis dari pelaksanaan perparkiran itu adalah di temen-temen UPT Malioboro yang merupakan notabnya adalah bagian dari Dinas Pariwisata, artinya kami lebih pada konteks membantu pada konteks komunikasinya bukan kami kemudian yang didepan tidak, tetapi mereka yang di depan sehingga konteksnya bukan kerjasama tapi menjadi bagian yang menjadi tanggung jawab bagi mereka kami *mensupport*.”

15. Bagaimana humas pemerintah kota Yogyakarta memosisikan media dalam pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro?

“Mengantisipasi dan merespon isu tidak harus dalam bentuk *statement*, klarifikasi, berpendapat tidak. Bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih *soft* gitu misalnya dengan diskusi-diskusi sempit dengan teman-teman media. Kita memberikan pemahaman kepada teman-teman media mulai dari latarbelakang, kenapa malioboro harus ditata konsekuensi-konsekuensi sosial dan ekonomi kemudian potensi berkembangnya seperti apa, dari diskusi itu kami ulangi kami bisa menarik kesimpulan bahwa media pun memiliki pandangan yang sama terkait dengan penataan malioboro, malioboro harus dibuat estetik lebih ramah manusia menjadi ruang publik, mengembalikan hak ruang publik non kendaraan. Media bukan hanya bisa memahami tapi sepaham dengan itu, hanya diskasnya adalah bagaimana mengatasi dampak-dampak dari penataan ini tidak terlalu kontraksi tinggi kemudian sama sekali pendapatan tukang parkir hilang dan lain sebagainya itu yang kita jelaskan ke media.”

16. Bagaimana evaluasi hasil yang dilakukan dalam pengelolaan relokasi parkir Malioboro? Apakah telah sesuai dengan tujuan humas pemerintah?

“Ya relatif ya, saya katakan relatif karena jujur tidak 100 persen tetapi kalo kita boleh melakukan evaluasi internal bahwa penataan parkir sebagai awal dari revitalisasi malioboro penataan malioboro secara keseluruhan sebagai langkah dasar berjalan, karena kan begitu mereka pindah dilakukan pelaksanaan penataan fisik malioboro dimana njenengan sekarang hasilnya sudah bisa dilihat. Itu tidak bisa dilakukan misalnya sekedar oke yang digarap sementara parkirnya berhenti besok kalo sudah selesai balik lagi *ga* memungkinkan seperti itu. Kami juga mengapresiasi kesadaran teman-teman pelaku parkir bahwasannya mereka beraktivitas dipinggir jalan itu ditoleransi tidak permanen pada kebutuhan tertentu diminta kembali untuk peruntukan yang lain. Inikan untuk peruntukannya dikembalikan sebagai hak publik. Nah pemerintah kota pemerintah DIY tidak menutup mata demikian saja bahwa publik membutuhkan tempat parkir itu dibutuhkan. Bahwa ada sebagai masyarakat yang membutuhkan pekerjaan sebagai tukang parkir itu fakta. Sebelum itu dilakukan penataan bangunlah dulu tempat parkir tingkat di taman parkir malioboro 2 atau yang kita kenal dengan nama abu bakar ali. Nah kalo kita lihat dampak konsep itu bisa penuh meskipun kemudian jujur kita katakan bahwa pendapatan dari tukang parkir yang sekarang ada di malioboro 2 itu mungkin tidak sebesar ketika mereka dulu ada di pinggir jalan, kenapa karena masyarakat sendiri belum sepenuhnya bisa membiasakan menempatkan kendaraannya ditempat yang sudah disediakan mereka masih mencari peluang-peluang untuk menempatkan kendaraannya di sirip-sirip artinya sebetulnya itu bukan sekedar pelanggaran yang dilakukan oleh jukir-jukir liar tapi juga pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat karena masyarakat mungkin terbiasa apabila menuju suatu titik mengupayakan agar kendaraannya dekat dengan itu mereka malas berjalan.”

17. Apakah masih ada pengelolaan isu yang dilakukan humas pemerintah pasca relokasi area parkir malioboro?

“Kalo bicara relokasi selesai, pasca relokasi kan ada tahapan yang lebih panjang lagi yang namanya penataan fisik malioboro membuat *telasar* malioboro, malioboro menjadi demikian nyaman, itu kan sebetulnya berada diluar penataan parkir.”

18. Apakah pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro memiliki hubungan dengan UU keistimewaan D.I.Y ?

“Ya kemarin saya sampaikan bahwa program-program atau pun kegiatan-kegiatan, saya bener ke ya bukan relokasi saja karena relokasi tahapan awal ya sebagai tahapan awal penataan malioboro untuk mengembalikan suasana malioboro bisa memenuhi aspek-aspek filosofis sebagaimana dalam lingkup undang-undang keistimewaan. Bicara relokasi itu adalah langkah awal prasyarat ketika kita akan berbicara pada penataan fisik malioboro faktor-faktor prasyaratnya harus diselesaikan dulu, sebetulnya tidak hanya pada fisik relokasi tetapi juga kesepatan dengan para pemangku kepentingan disana ada banyak komunitas disana, malioboro akan kita buat seperti ini mereka paham sehingga mereka tidak ada karena ketidak jelasan kemudian menolak. Ya memang yang paling terdampak adalah parkir karena parkir bener-bener di geser bukan dihilangkan *lo ya* itu yang terdampak jadi apakah itu ada kaitannya ya karena itu adalah langkah awal.”

19. Apakah pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro memiliki hubungan dengan Pergub Nomer 10 Tahun 2015 tentang *Brand/Logo* D.I.Y?

“Itu penjelasannya sangat filosofis sekali, karena tidak ada disana kemudian njenengan temukan simbol-simbol ikon renaisen jogja istimewa ada becak, gunung, kraton, dokar, tugu, lampu, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita berbicara tentang jogja istimewa lebih kepada kontek filosofis. Ketika itu kemudian nanti berkurang apa yang seharusnya menjadi media transportasi disana syukur-syukur nanti sudah terbangun pedestrian murni kendaraan *non* mesin, apa yang ada disana becak *dokar* bukan bentor bis kota. Mungkin satu-satunya kendaraan bermesin yang boleh disana adalah transjogja sebagai kendaraan publik. Jadi keterkaitannya bukan kok karena ini harus maka itu harus muncul, simbol-simbol renaisen ikon-ikon jogja itu harus muncul.”

20. Apakah pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro memiliki hubungan dengan penggalangan dukungan politik dari PPAMY?

“Tidak ada, dan tidak ada penjelasannya karena memang tidak ada. Sama sekali tidak ada hanya orang-orang mengkait-kaitkan biasanya kalo gitu.”

21. Apa faktor pendukung bagi humas pemerintah kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pengelolaan isu relokasi parkir Malioboro?

“Kalo pendukungnya konsep penataan malioboro yang dimulai dengan penataan perparkiran ini adalah mewakili ekspektasi harapan publik keinginan warga untuk jogja itu memiliki ruang publik yang memadai sehingga malioboro lebih bisa dinikmati kebijakan itu mewakili kebutuhan itu, itu faktor pendukung yang sangat

luar biasa sehingga kemudian kontra pendapat terkait penataan malioboro bisa kita selesaikan dengan menjabarkan itu. Ini hanya kebutuhakn ekonomi sekelompok orang atau tetap mengutamakan kepentingan publik selesai.”

22. Apa faktor penghambat bagi humas pemerintah kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pengelolaan isu relokasi parkir Malioboro?

“Nah tantangannya adalah penataan tersebut menyentuh pada hal yang paling prinsip bagi warga masyarakat yakni aktivitas pekerjaan itu sangat-sangat sulit sebetulnya untuk dilakukan langkah-langkah kongkrit, contohnya adalah yang sensitif juga menyangkut tanah misalnya gumuk pasir isu-isu bandara itu adalah hal-hal yang bersifat sensitif dan ekspektasi masyarakat itu masing-masing berbeda ada yang menyadari bahwa saya ini hanya menggunakan kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa punya aktivitas perparkiran. Ada yang memiliki pemikiran seperti itu sehingga nyaman untuk di pindahkan. Ada juga yang menganggap ini hak saya, ini hak kami sebagai warga memperoleh aktifitas pekerjaan kewajiban pemerintha memberikan pekerjaan ini yang agak sulit. Selanjutnya ada lagi isu-isu yang sekarang berkembang tentang perkembangan progres fisik dengan perkembangan pemahaman ini kurang *balance*, apa contohnya kemudian kita berbicara terkait itu adalah penolakan-penolakan terkait dengan pemindahan perparkiran dan yang terkini adalah perilaku-perilaku yang tidak menunjang itu misalnya para pemain kuliner disana membuang sampah disana, warga pengunjung membuang sampah tidak pada tempatnya itu adalah bukti *progress* penataan malioboro secara fisik ditata bagus dengan perilaku *stakeholdernya* ya masyarakat umum ya pelaku ekonomi disana.”

Nama : Tedi Saparian, S.E.

Jabatan: Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi

C. Pertanyaan untuk Humas Pemerintah Kota Yogyakarta

1. Bagaimana posisi humas di pemerintah kota Yogyakarta?

“Humas itu secara posisi ada dibawah Asisten Sekertaris Daerah, dan kalo secara teknis humas akan membantu supporting kepada kepala dinas yang bersangkutan. Misal ada pertanyaan seputar teknis kan yang menguasai mereka (kepala dinas). sebagai contoh pak ada jembatan ruboh nah kalo humas itu kan ga bisa jawab wah secara teknis ga bisa jawab ya mas ya karena ukurannya harus segini, besinya harus segini nah itu biasanya kita yang panggil kepala dinas kita temuin aja media ya formatnya seperti satu jumpa pers.”

2. Bagaimana peran humas di pemerintah kota Yogyakarta? Apakah humas berperan secara teknis atau strategis?

“Strategis kita mas, Ya conto gini waktu hotel ya mas, banyak orang yang mau mewawancarai kepala Dinjin. Ya mungkin kepala Dinjinnya bukan ga bisa, kurang PeDe tetep nanti minta didampingi humas. Kayak hotel kan ijin-ijin dan lainnya kan dari sana to mas ya humas jumlah Ijin hotel berapa ya kalo ga didampingi mereka kan ya ga tau to.”

3. Bagaimana rencana kerja humas pemerintah kota Yogyakarta pada periode sekarang?

“Kalo dibawah saya, karena saya belanja media ya hubungan saya ya ke media aja. Kalo masnya nanya kesaya ya. Saya dibagian Sub Bagian Humas dibawah saya ya mitranya ya media, kalo ibu Tutik Sub Bagian Promosi dan Publikasi mitranya itu Tv, media luar ruang, sama majalah internal.”

4. Bagaimana pengelolaan isu yang dilakukan oleh humas pemerintah kota Yogyakarta secara umum?

“Ya contoh tadi aja parkir itu ya, misalnya berita yang di koran isinya tukang parkir saja narasumbernya. Kalo baca berita di koran yang diwawancarai mereka tukang parkir aja, kita pengen yang diwawancarai itu difabel, walhi, Dewan Kebudayaan, kan adil gitu lo.”

5. Apa tanggapan humas pemerintah kota Yogyakarta terhadap pemberitaan penolakan relokasi parkir malioboro di media massa? Apa pengaruh pemberitaan tersebut terhadap pemerintah?

“Kita Sudah komitmen lah, pak tri udah komitmen dengan teman-teman, dia tidak akan menyanggah, berita negatif apapun tidak akan disanggah. Tapi kalo SKPD-nya itu merasa itu tidak anu, bukan disanggah ya mas tapi kita datang kesana. Misalnya beritanya negatif ini ya terus SKPD-nya pak kok beritanya itu ada yang salah itu. Pak tri itu udah komitmen dia ga bakal sanggah, dia hanya akan konformasi lah nelpon ke redaksinya mau ngobrol terus bawa SKPD itu. Tapi ga pernah pak kelik itu (Pak Tri) nyanggah woe beritamu elek ga pernah gitu. Dan biasanya sekarang yang minta itu SKPD-nya katanya itu berita bukannya salah, ada yang perlu dianu gitu ya kita bawa kesana.”

6. Bagaimana hubungan antara humas dengan komunitas PPAMY selaku salah satu masyarakat terdampak relokasi?

“Ya kalo teknis kita ga ini lah mas, tapi biasanya kita lewat kepala UPT-nya. Kalo itu kan udah sangat ini, kalo kita masuk ke ranah itu ga ini. Biasanya kepala UPT-nya pak Syarif. Ya seumpama masnya mau teknis kesana mudah-mudahan dia mau.”

7. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro dilakukan tanggal 4 April 2016?

“Ya walaupun itu sebenarnya kewenangan Provinsi ya mas ya, yang katanya jogja itu ada sumbu filosofinya nah ya itu, yang dari gunung merapi, tugu, sampe itu kan kelihatan bersih itu lo. Termasuk pak wali pun koordinasi dengan KAI, dulu pintu KAI itu kan agak-agak itu to mas, agak-agak ketutup seng to terus sekarang kan sudah agak jeruji itu, supaya orang-orang itu bisa melihat kearah sana. Dulu waktunya pak Jonan respon sekali pak Jonan.”

8. Bagaimana pengelolaan isu humas pemerintah kota Yogyakarta terkait relokasi parkir Malioboro terhadap juru parkir PPAMY? Bagaimana peran humas dalam pengelolaan isu tersebut?

“Ya tadi kan saya omongin to mas, kalo pak kelik komunikasinya dengan ini (redaktur), kalo saya komunikasinya dengan ini (wartawan). Isunya itu mbok saya usul itu sama temen-temen wartawan mbok yang diwawancarain jangan tukang parkirnya aja, jajal komunitas lain misalnya walhi setuju ngak, Dewan Kebudayaan.”

9. Bagaimana identifikasi isu yang dilakukan humas pemerintah kota Yogyakarta dalam penanganan relokasi area parkir malioboro?

“Kalo kita tu bawanya kesumbu filosofi aja mas, kalo sudah itu tu saya yakin, karena saya bukan orang sini ya mas tapi saya yakin dengan isu itu masyarakat jogja bakal banyak setujuannya.”

10. Bagaimana analisis isu yang dilakukan humas pemerintah kota Yogyakarta dalam penanganan relokasi area parkir malioboro?

“Kalo kita anu mas karena itu dulu masih kewenangan Provinsi kita minta temen-temen media itu mewawancarai orang provinsi, pokoknya orang provinsi aja mas silahkan diwawancarai lengkap gitu lo, terkait ini pemindahan parkir ke arah sana itu lo. Karena kita kan kasarnya pelaksana dari Provinsi dan anggaran disana ya enaknya dijogja itu lo mas kalo pak Gubernur sudah OK sepertinya OK semua, hanya sedikit yang menolak.”

11. Apa strategi yang dipilih humas pemerintah kota Yogyakarta dalam melakukan pengelolaan isu relokasi parkir Malioboro?

“Kalo pak kelik itu bener-bener megang redaksi (Bernas Jogja, Harian Jogja, Radar Jogja, dan Kedaulatan Rakyat) dia mas, jadi pak kelik itu sering banget diskusi dengan redaksi gimana kalo Malioboro bersih dari parkir ya termasuk masukan dari redaksi pun ada juga, misalnya jalan-jalan yang keluarnya itu lo, misalnya mereka komplain engko malah kono seng ngo parkir, dan ada jaminan dari Dishub sirip-sirip itu tidak boleh. Kan pernah sekali sidak mas memang ada juga si mas yang nakal parkir, oknum-oknum itu ada harus diakui karena temen-temen media punya bukti foto orang parkir ya memang sulit lah kayak gitu. Tapi kalo ada yang parkir banyak itu biasanya justru pedagang kok mas itu.”

12. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan isu humas pemerintah dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro?

“Ya happy endingnya itu ya jangan ada konflik lah kalo humas itu, pada saat relokasi kan banyak to mas ancaman-ancaman pada saat momen mau wajib dan hukumnya mau wajib. Ya biasanya kebijakan apapun bagusnya pro-kontra itu ada lah.”

13. Bagaimana program penanganan isu yang dilakukan humas pemerintah kota Yogyakarta dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro?

“Ya koordinasi dengan Dishub, UPT untuk melakukan diskusi-diskusi, misalnya kemaren waktu diadakan diskusi di DPRD kita ajak juga temen-temen media buat meliput berjalannya diskusi, ya jadikan teman-teman media punya narasumber lain to biar ga penolakan tukang parkir terus yang diberitain. Terus kita juga monitoring mas pemberitaan media, apa beritanya dimedia sudah ada yang positif atau masih banyak

negatifnya, ya hasilnya nanti buat bahan diskusi lagi sama temen-temen media, pokoknya pemberitaan itu harus adil gitu lo ngak dari tukang parkir terus.”

14. Apakah dalam penanganan isu relokasi parkir Malioboro humas pemerintah kota Yogyakarta melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah lain (Asisten perekonomian dan pembangunan, Dinas pariwisata Yogyakarta)?

“Internal ya mas, ya kita dengan Dishub dengan kepala UPT koordinasi, misalnya kepala UPT saya pengen ini dibawa kearah sini, ya kitalah yang ngobrol sama temen-temen media. Kan banyak link pengaduan to mas termasuk masuk ke UPIK itu seperti kenapa sirip-sirip masih banyak tempat parkir. Kalo versi mereka kan kesejahteraan, kalo versi pemerintah ya bersih aja semua termasuk sirip-siripnya dan yang bisa sidak seperti itu kan hanya Dishub biasanya kita koordinasi dengan Dishub. Temen-temen media tak suruh aja pas sidak ikut naik mobil Dishub ikut ke sirip-sirip itu. Alhamdulillah disini pengelolaan medianya sudah baik mas, ya termasuk temen-temen media itu sudah kenal dengan orang humas dan ke kepala SKPD pun mereka sudah familiar jadi sudah tidak ada istilah pelayanan satu pintu khusus untuk temen-temen media, semua SKPD boleh menyampaikan langsung ke media, kecuali mereka kesulitan baru mereka menghubungi humas. Kesulitan itu dalam arti ya misal waktu dia nelpon kebetulan ibunya ada acara dimana bapaknya punya acara dimana ya itu biasanya mereka hubungi humas. Tapi prinsip disini seluruh SKPD sudah bisa menghumasilah.”

15. Bagaimana humas pemerintah kota Yogyakarta memposisikan media dalam pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro?

“Temen-temen media itu kita anggap mitra, kritik saran tetep kita butuhkan dari mereka lah kalo ga ada kritik saran ya sudah lempeng aja ini pemerintah. Kadang-kadang mereka mau kritik pun ya kalo saya kan sering nongkrong disana terus mereka tanya beritane sesok arep tak gawe ngene mas, yo monggo. Yang kayak pak Haryadi dulu masih jadi wali ya pak Haryadi dikomplain terkait tower itu mereka cerita. Ya silahkan ya sama-sama butuhlah pemerintah butuh dikritik untuk perbaikan, mereka butuh berita. Itu ga masalah mas di pemerintahan ini tidak ada masalah kalo humasnya sendiri kita sudah kuat.”

16. Bagaimana evaluasi hasil yang dilakukan dalam pengelolaan relokasi parkir Malioboro? Apakah telah sesuai dengan tujuan humas pemerintah?

“Kebetulan asisten kita itu, bu ponco namanya beliau itu setiap satu bulan pola koordinasi itu jalan. Jadi asisten kayak humas itu pola koordinasinya dibawah bu ponco. Nah setiap bulan kita ketemu wajib menyampaikan keluhan-keluhan seluruh SKPD ya misalnya beritanya mengenai hotel terus, ya kalo humas memang isunya lagi itu ya ga bisa di anu, tapi biasanya kita hanya menyampaikan ke bu ponco biasanya kayak gitu tu kalo hitungan humas ya evaluasi humas itu rata-rata berita

yang negatif itu kalo yang besar ya itu tiga hari terbit dikoran sisanya habis, ya kayak yang biasa-biasa aja satu hari itu habis. Itu kita laporkan ke bu ponco itu bentuk evaluasinya. Ya sesuai, jangan ada konflik lah.”

17. Apakah masih ada pengelolaan isu yang dilakukan humas pemerintah pasca relokasi area parkir malioboro?

“Ya itu selesai kita selesai lah mas, akhirnya sekarang isunya kan ini mas misalnya PKL buang kotoran sembarangan, tekhelnya (marmer) jadi kotor. Ya yang kalo kayak gitu temen-temen media itu seneng mas ya terus aja dikritik kan jadi ketahuan oh ini ga bener jadi perbaikan. Kalo kita kan beda ya mata telinga mereka kan tajam bener ya ada hal sedikit pun pasti mereka tau kok.”

18. Apakah pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro memiliki hubungan dengan UU keistimewaan D.I.Y ?

“Ya ada, kan sumbu filosofi itu lo mas.”

19. Apakah pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro memiliki hubungan dengan Pergub Nomer 10 Tahun 2015 tentang *Brand/Logo* D.I.Y?

“Ya ada, seharusnya ada. Istimewa la itu kan jadi murni pedestrian”

20. Apakah pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro memiliki hubungan dengan penggalangan dukungan politik dari PPAMY?

“Itu kan waktu dulu relokasikan belum ada jamannya pilkada mas, ya kalo dari saya pribadi dari sisi humas yang saya lihat ga ada. Dulu itu murni, itu kan perencanaannya sudah lama oleh provinsi. Hanya pernik-pernik kecil itu, mungkin masnya sering baca koran yang ini pro ini yang ini pro ini, la kalo kita dari pemerintah jalan aja ya karena kita sudah tahu kalo kita netral kok toh itu dulu belum jaman pilkada kan waktu pemindahan kan Drs Haryadi Suyuti masih kepala daerah belum ada isu-isu pencalonan.”

21. Apa faktor pendukung bagi humas pemerintah kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pengelolaan isu relokasi parkir Malioboro?

“Humas punya konsep, saya itu wajib hukumnya ketemu temen-temen wartawan (Pawarta) dalam sebulan empat kali itu wajib saya ketemu, misalnya kepala SKPD kami hadirkan atau kalo tidak ketemu mereka kita bawa ke TKP mana yang mereka minta, misalnya mereka pengen yuk mas kita ke Tagana karena ada konsep bagus Tagana goes to School ya kita bawa mereka kesana. Pokoknya saya punya konsep pokoknya dalam sebulan itu empat kali dengan temen-temen media wajib ketemu. Makanya saya akan tahu lah isu-isu terus sayakan banyak nongkrong-nongkrong

disana (Pawarta) biasanya mereka minta mas njalok berita ini misalnya kepala dinas siapa, ya udah kesana aja. Kita sangat baiklah. Kalo pak kelik dia levelnya keredaksi.”

22. Apa faktor penghambat bagi humas pemerintah kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pengelolaan isu relokasi parkir Malioboro?

“Ya kalo dari sisi humas itu, kan gini mas walau pun mereka mitra kita mereka kan bukan dibawah kita ga bisa kita kontrol mereka padahal kita sudah ngomong yuk besok beritanya yang bagus sepertinya ini ga bisa gitu. Masih sangat sulit independennya masih sangat luar biasa.”

Nama : Aji

Jabatan: Ketua Paguyuban PPAMY

B. Pertanyaan untuk Ketua PPAMY (masyarakat penolak isu)

1. Bagaimana tanggapan anda tentang pemberitaan tentang penolakan relokasi area parkir malioboro?

“Pemberitaan itu ya sesuai fakta apa yang ada di lapangan mas, kita dari teman-teman juru parkir malioboro menolak untuk di relokasi ke taman parkir abu bakar ali. Penolakan disini bukan pada penolakan program pemerintah kota Yogyakarta tetapi lebih kepada dampak dari relokasi lah yang kita tolak. Temen-temen juru parkir menilai persiapan dan solusi yang dilakukan pemerintah belum betul-betul siap, padahal nantinya kita-kita yang merasakan dampak ketidak siapan pemerintah itu. Ya kalo tanggapannya dengan adanya berita tersebut di koran-koran semoga pemerintah mau memperhatikan kita, gitu aja si mas.”

2. Bagaimana tanggapan anda tentang pemberitaan tentang tanggapan Sri Sultan Hamengku Buwana X mendukung relokasi area parkir?

“Ya tentu ada perasaan kecewa mas kok pemimpinnya ga melindungi rakyatnya, tapi kalo yang udah ngomong sultan ya *sendiko dawun* saja. Karena ya gimana lagi mas, kan tanah malioboro ini juga masih milik sultan, kita kan juga cuma numpang untuk cari makan, cari nafkah buat keluarga di rumah.”

3. Bagaimana pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro pada tahun 2016?

“Kalo masalah relokasi area parkir Malioboro sebetulnya diskusinya udah mulai sejak taun 2013, tapi temen-temen juru parkir nolak terus kalo mau diajak rembukan sama orang pemerintah. Terus kan di taman parkir ABA kan sebetulnya udah ada komunitasnya mas, nah sampai waktu hampir mendekati batas relokasi kita belum ada komunikasi dengan paguyuban yang ada di taman parkir ABA kan kesannya kayak kita kurang gimana gitu mas, harusnya pemerintah memfasilitasi hubungan antara paguyuban yang ada disana dengan paguyuban kita, kan kalo udah terlanjut seperti sekarang jadi *pekewoh-pekewohan* mas. Belum lagi, sekarang petugas juru parkir yang mengelola taman parkir ABA ini di bagi menjadi dua paguyuban. Ada yang namanya PPAMY itu yang sejak dulu ada dan yang setelah relokasi ada paguyuban baru namanya FKPP ini yang ngetuai sekertaris saya dulu si hanarto. Jadi semenjak ada isu relokasi itu hanarto memang aktif ikut diskusi dengan pemerintah dan memang dia memiliki kedekatan dengan salah satu penguasa di jogja, terus setelah pelaksanaan relokasi diangkatlah dia sebagai perwakilan dari pemerintah untuk mengelola juru parkir di taman parkir ABA. ada kabar-kabar juga kalo hanarto ditunjuk oleh pemerintah karena ada anggapan keberhasilan relokasi kemaren adalah karena dia, padahal temen-temen juru parkir sendiri ga ada yang setuju sama dia. Semenjak dia ada paguyuban sendiri sekarang kondisi hubungan kita kurang baik.”

4. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi relokasi area parkir Malioboro yang diadakan pemerintah kota Yogyakarta? Bagaimana pelaksanaan sosialisasi tersebut?

“Wah kalo saya jarang mas, biasanya yang hadir itu si hanarto itu sama pak sigit. Mereka juga jarang bagi info hasil diskusinya sama temen-temen juru parkir.”

5. Apakah humas pemerintah kota Yogyakarta berperan aktif dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro?

“Kalo selama proses relokasi kemaren kita seringnya ketemu sama kepala UPT pak Syarif, sama pak aman juga itu orang pemerintah kota Yogyakarta, kalo dia malah sering banyak pro nya sama kita mas.”

6. Selain humas pemerintah, siapa pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro?

“Ya tadi itu mas, pak Syarif di UPT Malioboro, ada pak Eko Suryo juga dia orang Dinas Pariwisata menurut saya dia orang yang sangat peduli sama kita. Kita sering diajak diskusi pasca relokasi itu untuk bikin event bareng Dinas Pariwisata. Kan di lantai 3 masih kosong kan mas, jadi kadang Dinas pariwisata ngajak temen-temen juru parkir untuk bikin event di lantai atas terus dengan kayak gitu kan bisa jadi lebih banyak yang parkir ditempat kita. Ya lumayan lah mas walau cuman kalo pas ada event.”

7. Bagaimana Penanganan humas pemerintah kota Yogyakarta dalam relokasi area parkir Malioboro?

“Kalo kita yang lihat relokasi kemaren itu yang lebih menangani kita temen-temen juru parkir itu orang UPT Malioboro karena memang pihak yang mengeluarkan ijin parkir yang saya pegang dan beberapa lainnya pegang ya UPT Malioboro. Kalo humas mungkin baru akhir-akhir ini mas setelah relokasi selesai.”

8. Apakah humas pemerintah kota Yogyakarta dapat menampung aspirasi anda terkait relokasi area parkir Malioboro?

“Ya kalo dilihat setelah berjalannya relokasi ini ya kelihatannya masukan-masukan kita kemaren banyak yang mental mas, jadup juga kemaren kita minta di perpanjang tapi katanya sedang diproses terus sampai sekarang belum ada kabar lagi. Pernah juga waktu kita melaporkan parkir-parkir ilegal yang di sirip-sirip jalan itu terus dilakukan sidak dari Dishub tapi sekarang masih ada lagi dan tidak pernah di bereskan lagi. Ya gitu lah mas.”

9. Apakah tindakan yang dilakukan oleh humas pemerintah kota Yogyakarta dalam menangani relokasi area parkir Malioboro telah sesuai dengan harapan anda?

“Sebetulnya kan harapan kita itu cuma pengen relokasi tidak berdampak pada kesejahteraan kita mas, tapi kalo dilihat sekarang kesejahteraan kita sangat menurun, sekarang aja ya mas kalo kita jaga seharian itu baru bisa bawa pulang 30-50 ribu, kalo dulu waktu dibawah kita jaga satu hari udah bisa bawa pulang 150-300 ribu mas. Jauh banget lah pokoknya perbedaannya.”

10. Apakah solusi yang diberikan pemerintah kota Yogyakarta telah sesuai dengan kebutuhan anda?

“Ya belum to mas, kan yang kita inginkan itu kita temen-temen juru parkir bisa hidup sejahtera, bantuan dari pemerintah lewat jadup kemarin kan cuma dua bulan itu pun sangat pas-pasan buat hidup kita sehari-hari. Apa lagi sekarang sudah tidak ada jadup, parkirannya tidak pernah penuh padahal hari libur apa lagi hari biasa, ya cuma bisa sabar aja mas.”

11. Apa harapan anda dengan menolak relokasi area parkir Malioboro?

“Harapan kita tetep sama mas, ya agar dampak relokasi area parkir itu tidak mempengaruhi kesejahteraan kita. Sebetulnya kegiatan relokasi area parkir adalah hal yang bagus karena tempat parkir dikelola dengan semestinya tapi kalo dalam persiapan dan solusi yang ditawarkan belum siap ya jadinya relokasi malah membawa dampak yang merugikan bagi teman-teman juru parkir, ya seperti sekarang ini.”

12. Apa harapan anda bagi pemerintah kota Yogyakarta pasca relokasi area parkir Malioboro?

“Setelah relokasi ini yang masih menjadi harapan kita adalah segera dipenuhi janji pemerintah untuk memberantas parkir-parkir ilegal di sirip-sirip jalan malioboro itu, karena bagaimana pun orang akan lebih memilih untuk parkir disana yang dekat dengan tujuan mereka dari pada parkir di ABA terus mereka harus jalan lagi. Nah kalo sirip-sirip itu udah bisa bersih pasti di ABA parkirannya bisa penuh. Atau kalo bisa malah jalan malioboro harus seteril dari kendaraan bermesin sekalian, kalo itu kita mendukung 100 persen mas.”

13. Apakah paguyuban yang anda ikuti mendukung salah satu partai politik yang ada di Yogyakarta?

“Ngak mas, kita netral-netral aja. Nanti kalo kita dukung salah satu partai belum tentu mereka mau memperhatikan kita. Ya kalo menang kalo kalah bisa-bisa kita digusur mas.”

Nama : Priyantono

Jabatan: Ketua I Paguyuban FKPP

C. Pertanyaan untuk masyarakat Malioboro (masyarakat pendukung isu)

1. Bagaimana tanggapan anda tentang pemberitaan tentang penolakan relokasi area parkir malioboro?

“Semua menolak mas sedoyo nolak, soal e masalah sebetulnya itu cuma hasil. Yang namanya babat alas kan mulai dari nol lagi ga mungkin kalo sini langsung rame.”

2. Bagaimana tanggapan anda tentang pemberitaan tentang tanggapan Sri Sultan Hamengku Buwana X mendukung relokasi area parkir?

“Ngeh la sultan seng nduwe lemah, dia yang punya kekuasaan, dia yang punya jogja. Sebetulnya itu mas keliru kalo mau dibilang ngayomi kalo dulu sultan IX saya masih percaya kalo yang sekarang itu anaknya mas, anaknya yang terlalu serakah. Pembayun itu mas dia otaknya kan bisnisan apa-apa harta milik bapaknya pengen dikuasai. Ya kayak hotel-hotel itu yang pegang pembayun jangan salah, terus yang namanya feri itu juga otak-otaknya, saya bisa ngomong kayak gini karena saya punya temen smp yang sekarang jadi pacarnya pembayun.”

3. Bagaimana pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro pada tahun 2016?

“Ya yang terakhir itu diskusi bersama DPRD Provinsi sama pak cang, nah kan kita mintanya mundur setelah lebaran, tapi sama pak cang dari sana udah nyemprit je mas yang punya tanah udah suruh pindah jadinya mundurnya cuma bisa dua hari, wah kalo gini ga jadi lebaran saya mas. Memang ada diskusi-diskusi lain sebelum itu tapi semua masukan dari kita mental semua, ya modelnya kayak di Jakarta dibangunin dulu baru diusir. Kita juga udah ga bisa nolak lagi mas la wong pas relokasi itu yang jaga disekitar malioboro ada 260 personil, saya sendiri udah dibilangin kan temen saya itu intelnya PM besok jangan ikut-ikutan besok daerahmu bakal dijaga 260 personil. Kan tempat saya dulu yang deket sami jaya yang jadi tempat buat pasang sebanduk itu mas kan tempat saya juga yang paling keras nolak, terus yang udah diwanti-wanti itu saya, kendil, sigit sama endro kalo besok kamu masih ngelawan bakal diciduk sama intelnya PM, ya udah saya ya mundur aja, temen saya juga ada yang di datengin intelnya PM mas itu sebelum demo terakhir. Pokoknya kemaren itu Malioboro udah kayak kota mati mas isinya cuma polisi, satpol PP, sama tentara. Sebetulnya waktu sebelum relokasi kan ada pendaftaran juru parkir juga di UPT saya sebetulnya ga mau daftar, tapi dikejar-kejar sama kakak sama istri saya kan yang pegang surat ijin kan saya jadi mereka pada ngejar-ngejar saya.”

4. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi relokasi area parkir Malioboro yang diadakan pemerintah kota Yogyakarta? Bagaimana pelaksanaan sosialisasi tersebut?

“Ya dulu ada sosialisasi dari pemkot mas cuma yang ikut ketua paguyuban dulu si sigit aja, tapi setelah sosialisasi dia ga pernah disosialisasikan lagi ke anggota. Nah gara-gara itu akhirnya bikin temen-temen juru parkir mbatin kalo sigit ada main sama orang-orang penting.”

5. Apakah humas pemerintah kota Yogyakarta berperan aktif dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro?

“Kalo humas pemkot ya, kita jarang berhubungan sama dia, cuma dulu pernah tu waktu temen-temen juru parkir menyampaikan suara ke balaikota terus ketemu humasnya tapi beliau cuma jawab bukan wewenang saya gitu mas. Terus kita minta di pertemukan sama pak wali sampai sekarang ga ada kejelasan lagi.”

6. Selain humas pemerintah, siapa pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro?

“Paling UPT sama Dinpar, kayak kemaren sebelum relokasi kan juru parkir suruh ndaftar ke UPT sebagai bukti kalo mereka setuju untuk di pindah, nah UPT ini juga bikin sosialisasi kekeluarga juru parkir mas. Jadi UPT jelasin kenapa di relokasi, apa manfaatnya kalo mau pindah ke tempat baru gitu, itu temen-temen pada didatengin mas.”

7. Bagaimana Penanganan humas pemerintah kota Yogyakarta dalam relokasi area parkir Malioboro?

“Kita hubungannya sama Dinas Pariwisata supaya apa, misalnya ada event-event nanti dimasukin disini ya istilahnya buat tambahan-tambahan kayak kemaren ada pelatihan sinden selama dua belas hari sama pak Eko Suryo kan ketua Dispar udah ditaruh sini aja kan biar ada pendapatan lebih kita pokoknya hubungannya sama dispar. Saya juga udah ketemu sama pak Eko waktu itu pak nek iso event itu jangan sampai berhenti.”

8. Apakah humas pemerintah kota Yogyakarta dapat menampung aspirasi anda terkait relokasi area parkir Malioboro?

“Gimana ya mas, kita udah ngerasa kayak ga diperhatikan sama pemerintah, apalagi setelah jadup habis kita ya bisanya sabar. Tapi katanya ada rencana dari pemerintah bakal nutup jalan malioboro jadi kendaraan bermotor pada parkir disini itu bakal

dilaksanakan tahun 2020, ya udah sabar aja sampai 2020 padahal yang dirumah teriak ngeluh terus tapi kita ya bisa apa.”

9. Apakah tindakan yang dilakukan oleh humas pemerintah kota Yogyakarta dalam menangani relokasi area parkir Malioboro telah sesuai dengan harapan anda?

“Wah jauh mas, ya walaupun disini rame tetep itu jauh sama pendapatan kita waktu di bawah. Itu mbaknya jaga parkir dibawah ya sehari itu bisa bawa pulang 700 ribu lah sekarang nyari uang 30 ribu aja susah kok mas apalagi sekarang dibikin dua shift, shift saya kan masuk sekarang besok libur jadikan kerja sehari untuk dua hari walau pun kita dapetnya 100 ribu toh tetep sehari 50 ribu to ya. Kemarin ya Malioboro waktu tahun baru kemaren ini kita sehari dapet 213 ribu terus waktu saya dibawah pas tahun baru saya bisa bawa pulang hampir 1,5 juta itu ga sehari mas dari jam enam sore sampai jam empat pagi, saya hampir dapet 1,5 juta la disini saya dapet 200 ribu buat dua hari kan jauh sekali.”

10. Apakah solusi yang diberikan pemerintah kota Yogyakarta telah sesuai dengan kebutuhan anda?

“Belum mas, wong kita mintanya apa dikasihnya apa. Coba kalo dihitung-hitung kita dapet bantuan 50 ribu sehari sama ditambah dari parkir 30 ribu jadi 80 ribu untuk dua hari, satu hari kita harus cukup sama 40 ribu buat hidupin istri, 3 anak gimana cukup to. Buat hidup aja udah pusing apa lagi buat beli rokok itu mas, sekarang saya mikir-mikir dua kali itu padahal cuma buat beli rokok.”

11. Apa harapan anda dengan mendukung relokasi area parkir Malioboro?

“Kalo yang setuju itu biasanya mereka di janjiin sesuatu sama yang di atas. Waktu kemaren ndaftar yang daftar dari nomer 1-50 itu jadupnya 70 ribu kalo saya daftar yang terakhir dapetnya cuma 50 ribu ya buat daya tarik biar pada mau pindah. Katanya buat juru parkir ex malioboro yang mau dipindah nanti bakal dijatah lapak di bekas tempat dia parkir dulu tapi sampai sekarang kita masih ragu, kebijakan itu sudah sampai atas belum nanti tau-tau digusur satpol PP. Soal e mbak e ini pernah jualan di depan ramayana dikontrak ke tukang bakso di angkut kok padahal mbaknya sudah pegang surat ijin lapak makanya saya masih bingung apakah surat ijin itu sudah sampai keatas. Itu yang ngasih tawaran lewat pak Hanarto.”

12. Apa harapan anda bagi pemerintah kota Yogyakarta pasca relokasi area parkir Malioboro?

“Harapannya ya buat kesejahteraan aja, kita minta kesejahteraan kita aja. Terus sekarang juga parkir liar tu banyak mas, kita sebenarnya mau nyidak tapi takut

bentroknya, kita sebetulnya berani tapi nanti urusannya sama kampung kan repot lagi. Kita juga udah lapor ke Dinhub sama Polers udah terus nyidak tapi cuma sehari tok tapi ya terus besoknya balik lagi. Apa lagi sekarang kan posisinya kan masuk ke ranah pilkada to, ketuanya juga kan sekarang ikut kampanye lepas tangan, terus baru mau masuk lagi kalo haryadi jadi lagi itu ketua FKPP pak hanarto, ignatius hanarto. Dia kan staff ahlinya pak Haryadi. Temen-temen juga sebetulnya banyak yang ga setuju sama pak Hanarto, mereka sebetulnya waktu di paguyuban itu ya empat sekawan sigit, narto, asmat, sama ego jadi mereka itu seperti sudah ada perjanjian siapa yang diatas harus mbantu yang di bawah waktu itu yang di atas narto terus sigit ego ya tetep dipikirin terus ya mereka berempat itu muter sendiri. Kalo saya sebetulnya netral disini juga saya ditunjuk jadi wakil ketua FKPP itu juga cuma ditunjuk bukan voting istilahnya ga resmilah wong omongan saya ga pernah diangep sama pak hanarto ya ngapain, saya di sini cuma buat jadi bemper pak narto.”

13. Apakah paguyuban yang anda ikuti mendukung salah satu partai politik yang ada di Yogyakarta?

“Ya sebagian masih ada mas, kalo ketua paguyuban ya dukung pak Haryadi kan dia kan staff ahlinya, kayak waktu kemaren pas kita rapat di Gamping pak narto dateng sama pasukannya mereka kampanye ya ga pake motor gitu, mereka ngobrol-ngobrol, foto-foto. Nek saya mikirnya siapapun yang jadi harus mau memikirkan bagaimana nasib yang di sini bisa jadi lebih sejahtera, ya kebersamaan lah jangan sampai digusur. Soalnya kan sudah ada isu kalo besok yang jadi Imam yang penduduk bukan kota suruh pergi ga boleh parkir disini, itu isunya.”

GERUDUK BALAIKOTA

Jukir Ancam Duduki Malioboro Saat Pemindahan

YOGYA (KR) - Sebagian juru parkir (jukir) di sisi timur Malioboro kembali menggelar aksi unjukrasa. Kali ini, puluhan jukir yang tergabung dalam Komunitas Parkir Malioboro tersebut menggeruduk kompleks Balaikota Yogyakarta, Kamis (31/3).

Saat proses pemindahan lokasi parkir menuju Abu Bakar Ali (ABA) pada 4 April 2016, mereka mengancam akan menduduki Malioboro dengan mendatangkan seluruh jukir yang ada di Kota Yogya.

"Kami akan datangkan semua jukir yang memegang surat tugas di Kota Yogya untuk berkumpul bersama-sama dengan jukir di Malioboro pada 4 April 2016 sebagai bentuk dukungan agar menunda relokasi sebelum ada jaminan kepastian terhadap kesejahteraan," ungkap Sekjen Forum Komunikasi Pekerja Parkir Kota Yogya, Endro Suraksono saat melakukan orasi di depan Grha Pandawa Balaikota kemarin.

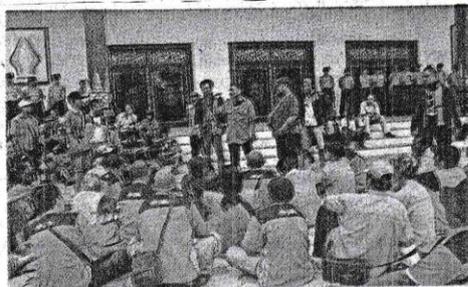
Hingga saat ini, sebagian jukir di sisi timur Malioboro tersebut masih menolak dipindah di parkir portabel ABA. Alasannya juga masih sama

panjang hingga satu tahun.

Walikota Yogya, Haryadi Suyuti, mengaku memahami seluruh aspirasi para jukir. Situasi terkini terkait rencana pemindahan parkir tersebut pun sudah dilaporkan ke Gubernur DIY. Pihaknya akan tetap menjalankan sesuai surat edaran terkait operasionalisasi parkir portabel ABA. "Harapan kami, pos pelayanan yang ada di UPT Malioboro bisa dimanfaatkan oleh para jukir yang

memegang surat tugas. Di sana akan diberikan informasi yang jelas, sehingga tidak simpang siur. Masih akan kami layani hingga Jumat (1/4)," tandasnya.

Sesuai dalam surat edaran, maka per 4 April 2016, kawasan sisi timur Malioboro sudah steril dari aktivitas parkir sepeda motor. Petugas akan ditempatkan di sepanjang Malioboro guna mengarahkan pengendara sepeda motor agar



KR-Ardhi Wahdan

Sebagian jukir Malioboro mendatangi kompleks Balaikota Yogya.

memarkir kendaraan di parkir portabel ABA.

Selain itu, dari 95 jukir di sisi timur Malioboro yang memiliki surat tugas, sebagian sudah melakukan pendataan. Data sementara, ada 21 jukir yang datang ke pos pelayanan dan tengah dilakukan verifikasi. Tiap jukir juga diperbolehkan membawa pembantunya masing-masing yang dibuktikan dengan identitas yang jelas.

(Dhi)-a



KR-Bambang Nurcahya

Sisi timur Jalan Malioboro bebas parkir, sepeda motor pengunjung justru diparkir di sisi barat.

Instansi
1. UPT. Malioboro
2.
3.
4.
5.

✓ Netral
 ✓ Segera

Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

KHAWATIR PENDAPATAN TURUN PASCARELOKASI

Puluhan Jukir Malioboro Wadul Anggota Dewan

YOGYA (MERAPI) - Puluhan orang juru parkir (jukir) di kawasan Malioboro menggeruduk Gedung DPRD Kota Yogya, Kamis (17/3). Mereka meminta kejelasan tentang penataan kawasan Malioboro yang berdampak pada relokasi juru parkir dari sisi timur Malioboro ke Taman Parkir Abu Bakar Ali.

Koordinator aksi Sigit Karzana mengatakan, pihaknya tidak alergi terhadap penataan kawasan Malioboro. Namun, pemerintah wajib memperhatikan kesejahteraan mereka seperti saat masih bekerja di sisi timur Malioboro.

"Kami juga belum memperoleh sosialisasi tentang konsep penataan Malioboro. Apalagi soal



Perwakilan jukir Malioboro saat berdialog dengan DPRD Kota Yogya.

pemindahan juru parkir di sisi timur Malioboro ke Abu Bakar Ali," kata Sigit.

Menurutnya, sedikitnya 211 juru parkir dan pembantu juru parkir, menggantungkan nasibnya di kawasan Malioboro. Kemungkinan, jumlah tersebut tidak akan ditampung bekerja di Taman Parkir Abu Bakar Ali seluruhnya. Padahal, berdasarkan informasi yang diterima Sigit, per 2 April mendatang, parkir di sisi Timur Malioboro mulai dipindahkan ke Taman Parkir Abu Bakar Ali.

"Kami juga mempertanyakan komitmen pemerintah untuk menjaga agar tidak muncul kantong-kantong parkir baru di sekitar Malioboro," ujarnya.
 * Bersambung ke halaman 9

Puluhan

Jika muncul kantong parkir baru di sekitar Malioboro, Sigit memastikan, Taman Parkir Abu Bakar Ali akan sepi. Misalnya di Jalan Perwakilan akan berubah dari parkir mobil menjadi kawasan parkir motor.

Tak hanya itu, kapasitas parkir di Taman Parkir Abu Bakar Ali juga dinilai tidak mencukupi, karena hanya mampu menampung 2.600 sepeda motor. Padahal, kata Sigit, kebutuhan lahan parkir mencapai 4.600 sepeda mo-

tor.

"Kami juga mendengar akan diberi jaminan hidup sebesar Rp 50 ribu per hari selama 2 bulan setelah pindah ke Taman Parkir Abu Bakar Ali," imbuhnya.

Jika pemerintah tidak menggubris jeritan juru parkir ini, mereka akan alih profesi menjadi pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Malioboro. Apalagi, jika penataan yang dilakukan pemerintah sangat berdampak pada menu-

runnya kesejahteraan mereka.

Menanggapi unek-unek para juru parkir ini, Ketua DPRD Kota Yogya Sujanarko yang didampingi unsur pimpinan dewan mengaku belum dapat memaparkan konsep penataan Malioboro. Pasalnya, pihaknya belum mengetahui pasti mengenai konsep penataan Malioboro.

"Kami akan mengusulkan pertemuan lanjutan pada Jumat (18/3) dengan mengundang Pemkot Yogya un-

tuk memaparkan konsep penataan Malioboro," jelasnya.

Sebelumnya, Walikota Yogya Haryadi Suyuti mengatakan, Pemkot Yogya terus melakukan sosialisasi penataan kawasan Malioboro. Haryadi berharap, konsep penataan Malioboro harus beragam, baik yang dilakukan Pemkot maupun Pemda DIY.

"Relokasi dilakukan demi kebaikan bersama dan demi kebutuhan yang lebih besar," tandasnya.

Instans			
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4. <u>UPT Malioboro</u>			
5.			

Yogyakarta,
 Kepala

Masyarakat Butuh Kawasan Pedestrian

■ Relokasi Parkir Malioboro Mulai 4 April

■ Jurkir Minta Ada Uji Coba Terlebih Dulu

YOGYA, TRIBUN - Puluhan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Malioboro (PJPM) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta, Senin (28/3).

Kedatangan puluhan juru parkir ini guna beraudiensi dengan Dewan, untuk meminta kejelasan atas relokasi parkir Malioboro yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ketua Paguyuban Juru Parkir Malioboro, Sigit Karsana Putra, menuturkan, pihaknya masih bersikeras meminta rencana relokasi parkir Malioboro yang bakal dilaksanakan pada tanggal 2 April mendatang untuk ditunda sampai tiga bulan ke depan.

Ia mengatakan, penundaan ini dikarenakan belum ada kejelasan kebijakan dari Pemkot sendiri terkait relokasi. Pihaknya juga meminta uji coba selama beberapa waktu untuk mengetahui dampak sosial yang terjadi pascarelokasi ke TKP ABA.

"Kami minta uji coba tiga hari dulu, pada masa-masa sepi secara bertahap. Apa dampak sosial yang terjadi, apakah hanya berdampak pada tukang parkir atau PKL lain. Padahal tinggal berapa hari lagi, tidak ada komunikasi dari eksekutif sama sekali," ujar Sigit, Senin (28/3).

Sigit juga mengeluhkan munculnya oknum yang melaksanakan pendataan di luar Paguyuban. Ia khawatir, malah dari orang-orang di luar paguyuban yang menerima fasilitas



Masyarakat sudah sangat membutuhkan pedestrian, terutama kaum difabel

HARYADI SUYUTI
Wali Kota Yogyakarta

dan kompensasi dari Pemkot Yogyakarta.

"Ada oknum yang muncul mendata jukir di luar paguyuban. Data yang paling sah ya dari kami, dari data paguyuban. Sampai hari ini teman-teman masih gelisah. Kalau dua bulan sudah direlokasi, ternyata tak sesuai ekspektasi, dan ternyata lahan yang lama sudah dirakayasa fisik. Kami tidak bisa kembali lagi, oleh karena itu kami minta surat permohonan penundaan sampai Idul Fitri," tutur Sigit.

Wali Kota Yogyakarta,

Haryadi Suyuti, menegaskan, tidak akan ada penundaan relokasi parkir di kawasan Malioboro, namun hanya pergeseran waktu untuk koordinasi dan tahapan persiapan. Relokasi yang semula dilaksanakan pada tanggal 2 April, akhirnya digeser menjadi tanggal 4 April mendatang.

Ia menegaskan, relokasi parkir Malioboro mutlak dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar, terutama kawasan pedestrian yang sudah benar-benar dibutuhkan masyarakat, khususnya kaum difabel yang selama ini kesulitan mengakses jalan.

"Begitu tanggal 4 April dilaksanakan, kita akan langsung pagari. Kita minta kerja sama dengan teman-teman jukir. Masyarakat sudah sangat membutuhkan pedestrian, terutama kaum difabel. Kalau masih ngeyel, saya berani untuk uji publik," ujar Haryadi.

● ke halaman 14



JELANG RELOKASI - Sejumlah petugas memindahkan kursi yang semula dipasang di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Senin (28/3). Pemindahan tersebut merupakan langkah awal penataan parkir di kawasan tersebut.

Kepala

1.
2.
3.
4.
5.

Dak Lanjut

Ditunggapi

Diketahui

Pa Pers

.....

Masyarakat Butuh Kawasan Pedestrian

• Sambungan Hal 13

Pos pelayanan

Haryadi menyebut, pos pelayanan akan dibuka pada saat relokasi, pada pukul 08.00 pagi selama tiga hari berturut-turut, Rabu sampai Jumat, untuk melayani pendataan juru parkir yang

resmi terdaftar oleh Pemkot Yogyakarta.

"Yang mendaftar adalah jukir, yang diberi surat tugas adalah jukir itu sendiri. Soal jukir pembantu atau asisten itu tanggung jawab jukir sendiri," ujar Haryadi.

Pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak dua unit shuttle bus ukuran medium yang ditempatkan di TKP ABA, dan beroperasi ke selatan menyusuri Jalan Malioboro, dan berbalik lagi ke utara

melalui Jalan Mataram dan kembali ke TKP ABA.

Bus ini dapat digunakan ketika relokasi untuk membawa karyawan toko, petugas toko, dan pedangang, yang beroperasi pada jam berangkat kerja 8.30-9.30 dan setengah jam setelah jam pulang kerja. Pihaknya juga akan menyiapkan halte khusus untuk shuttle bus gratis ini.

"Bus ini beroperasi gratis, khusus untuk mereka

karyawan dan pedagang di kawasan Malioboro. Untuk itu kita lihat prosesnya dua minggu ke depan," katanya.

Terakhir Haryadi meminta kepada masyarakat untuk memberikan dukungan untuk pemindahan zona parkir, dengan cara menggunakan zona parkir yang telah ditetapkan di TKP ABA, sehingga kawasan sisi timur dapat sepenuhnya dimanfaatkan menjadi kawasan pedestrian. (rik)

Cari Solusi Relokasi Parkir

■ Hari Ini Dewan Undang Pemkot-Jukir Malioboro Satukan Gagasan



Besok pagi (hari ini, Red) kita undang Pemkot, termasuk perwakilan jukir langsung diundang untuk menyatukan gagasan. Sebetulnya konsep apa yang akan dilaksanakan, supaya segera jelas solusinya

Sujanarko

Ketua DPRD Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Ratusan juru parkir Malioboro yang tergabung dalam Paguyuban Parkir Malioboro mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta, Kamis (17/3) pagi. Mereka menuntut kejelasan kepada Pemkot Yogyakarta terkait kebijakan relokasi parkir Malioboro yang masih tak jelas sampai saat ini.

Mewakili juru parkir Malioboro, Ketua Paguyuban Parkir Malioboro, Sigit Karsana Putra, mengatakan, kedatangannya bersama rekan-rekan juru parkir Malioboro ke

Kantor DPRD Kota Yogyakarta tak lain adalah untuk meminta diadakannya audiensi terkait kejelasan terkait kebijakan relokasi parkir Malioboro.

Ia menilai, kebijakan relokasi parkir Malioboro dilaksanakan tanpa kejelasan komunikasi kepada juru parkir Malioboro. Menurutnya, kebijakan tersebut jika tetap dilaksanakan, hanya akan merugikan dan merampas kesejahteraan para jukir.

"Kami meminta kejelasan terkait relokasi

kehalalamanan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.			
5.			

Yogyakarta,
 Kepala

Ttd

Cari Solusi Relokasi

• Sambungan Hal 13

parkir. Karena selama ini, tidak ada komunikasi kepada kami, kapan dan bagaimana konsep penataannya. Kami meminta audiensi, Kalau mau relokasi konsepnya bagaimana, ayo kita beradu konsep di sini." ujar Sigit, Kamis (17/3) di sela-sela Audiensi di Kantor DPRD Kota Yogyakarta.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta, Sujanarko, mengakui, tidak ada komunikasi dari pihak eksekutif kepada legislatif dalam hal ini dewan akan kebijakan penataan parkir.

Menurutnya, sejatinya konsep penataan parkir Malioboro merupakan permintaan dari Pemda DIY. Sedangkan, Pemkot Yogyakarta membantu untuk relokasi. "Untuk kebijakan relokasi, memang permintaan dari Pemprov. Namun fa-

talnya, kebijakan itu belum pernah disampaikan kepada dewan," ujar Sujanarko.

Audiensi yang dilakukan akhirnya gagal, karena tidak ada perwakilan dari eksekutif yang mampu menjelaskan konsep penataan. Sementara Jukir Malioboro meminta audiensi dapat menghadirkan eksekutif atau wali kota secara langsung untuk duduk bersama Jukir bersama legislatif supaya tidak terdapat penyimpangan gagasan.

Untuk itu, selanjutnya Dewan akan mengundang pihak dari eksekutif untuk menjelaskan terkait kebijakan relokasi atau penataan parkir Malioboro dalam audiensi yang akan dilaksanakan, Jumat (18/3) di Kantor DPRD Kota Yogyakarta, untuk memenuhi aspirasi Jukir Malioboro dan untuk mendengarkan penjelasan langsung dari Pemkot Yogyakarta.

"Besok pagi (hari ini, **Red**) kita undang Pemkot, termasuk perwakilan Jukir langsung diundang untuk menyatukan gagasan. Se-

betulnya konsep apa yang akan dilaksanakan, supaya segera jelas solusinya," tutur Sujanarko.

Audiensi lagi

Tak mendapatkan solusi, juru parkir memutuskan untuk pulang dan kembali audiensi, Jumat (18/3) hari ini. Mereka berharap ada titik terang dari permasalahan yang mereka hadapi nanti.

"Kalau belum ada kejelasan, kami akan tetap kejar. Dengan risiko apapun, akan kami hadapi. Kami tak mau pindah ke utara. Bahkan kami akan alih profesi kalau tidak parkir Malioboro dipaksa berhentikan," tegas Sigit lagi.

Puluhan aparat Kepolisian telah berjaga-jaga di kantor DPRD Kota Yogyakarta sedari pagi untuk mengawal aksi juru parkir malioboro. Pihak Kepolisian pun meminta kepada Juru Parkir untuk tetap berlaku tertib dan tidak menimbulkan keributan pada saat audiensi yang akan dilaksanakan Jumat (18/3) hari ini. (**rlk**)

Jamin Tak Akan Ada Penyusup

HS: Parkir ABA Hanya untuk Jukir dari Malioboro

JOGJA - Rencana relokasi juru parkir (jukir) di sisi timur Jalan Malioboro ke Taman Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali (ABA) mundur dari jadwal semula. Jika sebelumnya, relokasi pada 2 April, kini diundur hingga 4 April 2016. Sebab, proses pendataan jukir masih

berlangsung. Disamping itu, pemkot juga tengah menyiapkan sarana pendukung lain. Wali Kota Haryadi Sinyuti (HS) mengaku, kemunduran itu sebagai buntut dari persiapan yang dilakukan.

► Baca Jamin... Hal 7

■ JAMIN...

Sambungan dari hal 1

Salah satunya pendataan jukir yang akan pindah ke lokasi baru tersebut. "Pendataan menjadi

Rabu (30/3) besok sampai 1 April," tutur HS, kemarin (28/3).

Dia menjelaskan, pendataan ini tetap sama. Pemkot membuka pos pelayanan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Malioboro. Pos ini mulai buka pukul 08.00 WIB. "Pendataan ini untuk jukir dan pembantuannya," tegasnya.

Dalam pendataan ini, HS menjamin, tak akan ada penyusup.

Artinya, jukir *gawan* siapa pun akan ditolak, jika mereka selama ini bukan jukir Malioboro. "ABA semuanya untuk jukir dari Malioboro," jamin HS.

Selain masalah pendataan,

lanjut HS, pihaknya harus mempersiapkan berbagai infrastruktur lain. Termasuk mengenai *shuttle bus* untuk mengangkut karyawan toko Malioboro. Selama ini mereka parkir di sisi timur jalan utama itu.

Pemkot akan menyiapkan dua *shuttle bus* untuk antarjemput karyawan dan wisatawan ke Malioboro. Bus ini beroperasi dari TKP ABA mulai pukul 08.30 atau setengah jam sebelum toko buka. "Bus ini selesai beroperasi setengah jam setelah toko tutup. Silahkan menunjukkan identitas sebagai karyawan. Bus ini gratis," katanya.

HS juga akan menegaskan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di bawahnya untuk mengamankan lokasi yang selama ini digunakan sebagai tempat parkir sepeda motor. Ini agar tidak menjadi lahan kosong. "Jika dibiarkan begitu saja, bisa dipakai parkir



Kami sambat ke dewan. Agar bersedia mendampingi proses pendataan ini."

· SIGIT KARSANA PUTRA
Ketua Paguyuban Parkir Malioboro

lagi," tandasnya.

Dari kalangan jukir, kemarin puluhan juru parkir sepeda motor di Malioboro kembali mendatangi gedung DPRD Kota Jogja. Mereka menyayangkan langkah yang dilakukan pemerintah yang melakukan pendataan satu per satu pada juru parkir.

"Seharusnya, pendataan dilakukan melalui paguyuban,"

kata Ketua Paguyuban Parkir Malioboro Sigit Karsana Putra.

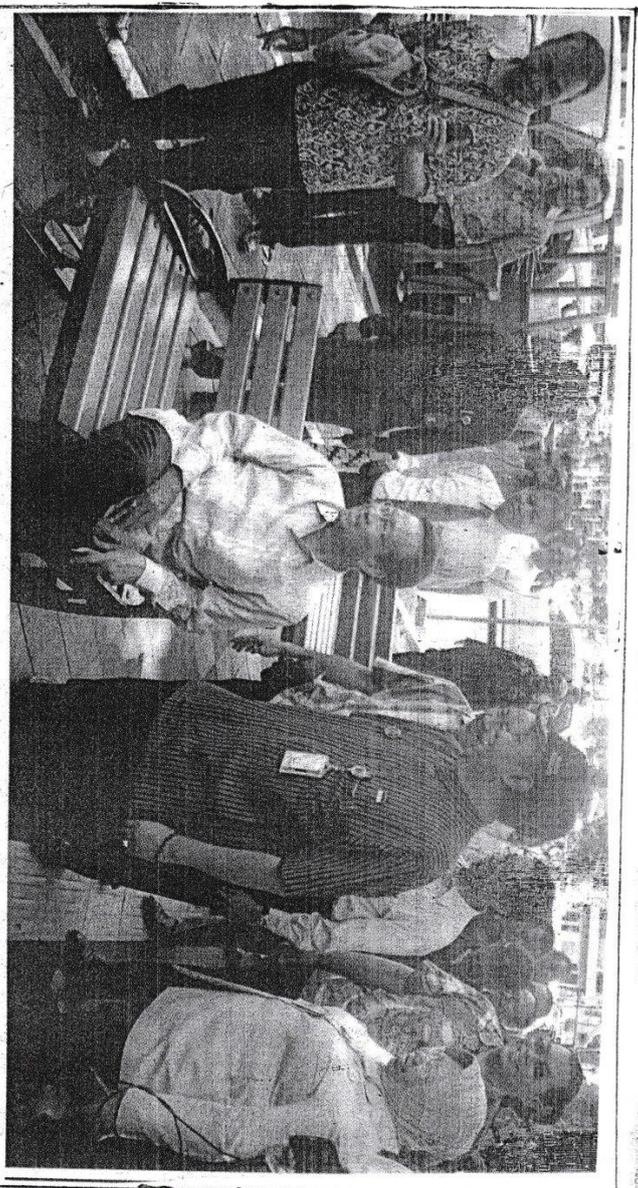
Dia mengatakan, pendataan yang dilakukan pemerintah cenderung akan menimbulkan rasa curiga di antara jukir. Apalagi, jika dilakukan tak transparan. Bisa-bisa jukir Malioboro tersisih dengan jukir titipan.

Mereka pun meminta pendampingan dari kalangan wakil rakyat untuk mengawal proses relokasi. Mereka juga berharap relokasi bisa ditunda. "Kami sambat ke dewan. Agar bersedia mendampingi proses pendataan ini," katanya.

Menanggapi desakan itu, Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko mempersilakan jukir untuk mendata sendiri. Dewan juga akan menyampaikan surat permohonan ke Pemprov DIJ untuk penundaan relokasi. "Nanti data dari jukir dengan pemkot akan divalidasi," tandasnya. (eri/ila/ga) it

1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3. UPT Malioboro	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4. Din. Perhubungan			
5.			

Yogyakarta,
Kepala



Gubernur DIY Sri Sultan HB X mencoba menikmati fasilitas umum kursi santai di trotoar Temur Jalan Malioboro Yogyakarta setelah pelokasi parkir.

Ka Bambang Nurcahya

Ngarso Dalem Semangati Juru Parkir Abu Bakar Ali

■ Kota Yogya Butuh Lahan Parkir Seluas 30 Ribu Meter Persegi

Saya berterima kasih kepada bapak-bapak yang bersedia pindah. Tahap awal memang hanya seperti ini yang bisa kami lakukan, tapi kami akan tetap terus memperhatikan (kesejahteraan) bapak-bapak jukir

YOGYA, TRIBUN - Ketika mengunjungi lokasi parkir relokasi di TKP ABA pada Selasa (5/4), Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyempatkan diri berdialog langsung dengan juru parkir (jukir). Selain memberikan apresiasi kepada para jukir yang rela direlokasi, Sultan juga menyemangati mereka.

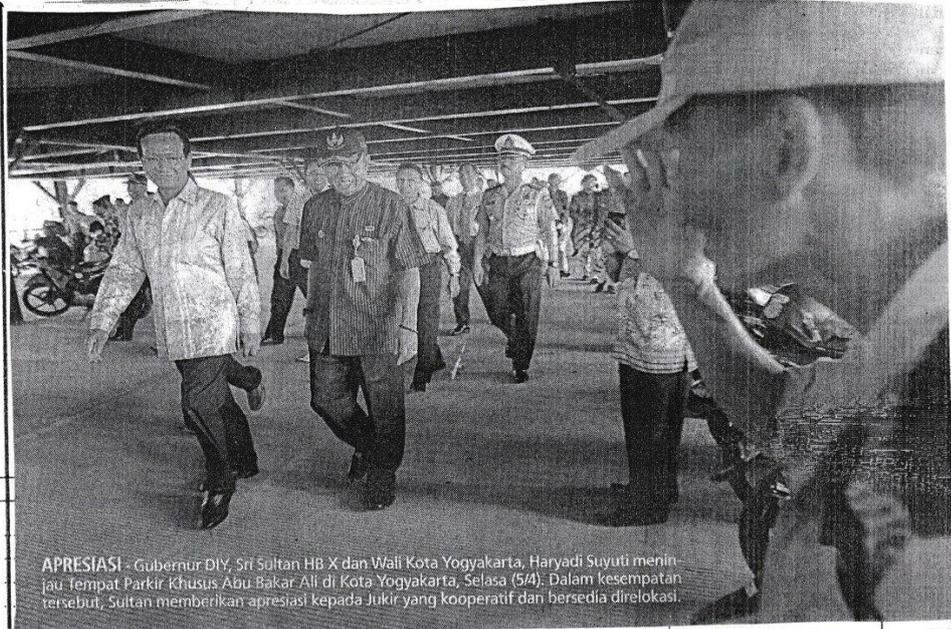
"Saya berterima kasih kepada bapak-bapak yang bersedia pindah. Tahap awal memang hanya seperti ini yang bisa kami lakukan, tapi kami akan tetap te-

rus memperhatikan (kesejahteraan) bapak-bapak jukir sekalian," ujar Sultan.

Sultan menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup para jukir la be harap para jukir bisa tergabung dalam koperasi yang akan difasilitasi Waliko.

"Harapannya, koperasi tersebut tidak kedar untuk menkonsolidasikan poter parkir di ABA namun juga harus ada ti get bagi para jukir untuk mendapatk

ke halamant



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

APRESIASI - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X dan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti meninjau Tempat Parkir Khusus Abu Bakar Ali di Kota Yogyakarta, Selasa (5/4). Dalam kesempatan tersebut, Sultan memberikan apresiasi kepada Jukir yang kooperatif dan bersedia direlokasi.

UPT Malioboro

✓ Netral

✓ Biasa

✓ Untuk diketahui

Yogyakarta,
 Kepala

Ngarso Dalem Semangati Jukir

• Sambungan Hal 1

bonus. Kalau bisa menarik yang parkir banyak, tentu pendapatan bapak-bapak bisa bertambah," terang Sultan.

Sultan menjelaskan bahwa relokasi parkir merupakan bagian dari pembangunan kebersamaan yang lebih baik. "Diakui, kami (pemerintah) juga perlu investasi. Dengan relokasi ini, harapannya masyarakat merasa Malioboro lebih tertib, pmda diuntungkan dengan pemasukan, dan tentu wajar jika jukir mendapat bonus," tutur Sultan.

Untuk sistem pelaksanaan koperasi bagi para jukir, Sultan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota. Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan koperasi berlaku bagi jukir yang mempunyai surat tugas dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro. "Saya akan lebih melihat pada badan hukumnya yang bermitra kepada pemerintah. Koperasi akan mengurus kesejahteraan para jukir, karena itu pengelolaan dilepas ke jukir langsung," tutur Haryadi.

Dari keterangan yang diperoleh, seluruh Jukir di Abu Bakar Ali ini akan mendapatkan kompensasi dari Pemkot sebesar Rp 50 ribu per orang per hari. Selain itu, juru parkir juga mendapat bagi hasil dari perolehan parkir yang dibagi rata

ke seluruh jukir. Pemkot juga membebaskan mereka dari retribusi parkir selama enam bulan ke depan.

Parkir vertikal

Sultan juga menjelaskan bahwa Yogyakarta membutuhkan 30 ribu meter persegi lahan parkir untuk kawasan Malioboro. "Harus ada alternatif ruang kosong untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Harapannya kita bisa membangun kantong-kantong parkir vertikal lain seperti di eks-UPN (samping hotel Melia) atau lahan milik PT KAI," tutur Sultan.

Ia mengungkapkan, apakah ada kemungkinan lahan untuk tempat parkir baru di lahan milik PT KAI. Sultan berharap Walikota bisa berdiskusi dengan pihak PT KAI untuk membangun parkir vertikal di Bong Suwung, sisi barat stasiun Tugu Yogyakarta.

"Ngarso Dalem berharap bisa ada penambahan ruang parkir vertikal di seputaran stasiun, jadi mungkin saja dibangun diatas rel kereta api. intinya, semua untuk mengantisipasi saat musim liburan. Tapi semua harus koordinasi dulu dengan dinas-dinas terkait," ujar Haryadi.

Haryadi mengatakan 30 ribu meter persegi adalah angka ideal lahan parkir untuk menampung kendaraan saat liburan tiba.

Tarif progresif

Sebelumnya, Pemkot Yogyakarta menjanjikan selama dua hari relokasi, pengguna jasa parkir di TKP Abu Bakar Ali akan digratiskan. Namun

dari pantauan Tribun, pada Selasa (5/4) jukir di lokasi tersebut sudah memungut tarif ke pengguna jasa parkir.

Jukir menggunakan karcis dengan label Pemkot Yogya dan Koperasi Komaba. Di karcis tersebut tertulis tarifnya Rp 1.000 untuk dua jam pertama dan untuk selanjutnya dikenakan tarif 50%. Yang menarik, saat Tribun mencoba parkir dan menyodorkan uang Rp 1000, petugas tetap memungut dengan besaran Rp 2.000.

"Ini upah buat ganti kerja keras teman-teman mas," ujar jukir yang enggan menyebutkan namanya.

Sejumlah jukir di TKP Abu Bakar Ali juga masih bingung terkait upah yang dijanjikan oleh pemerintah. Patjo (50), seorang jukir mengaku bingung bagaimana penerimaan upahnya menjadi jukir di TKP ABA. "Saya tidak tahu akan dikasihnya harian atau bulanan, yang saya tahu sehari mendapat kompensasi sebesar Rp 50 ribu. Itu diluar penghasilan harian dari motor yang terparkir," ujarnya.

Jukir lainnya Kamidi (56) menjelaskan bahwa pendapatan harian jukir yakni Rp 50 ribu ditambah jumlah total hasil parkir motor harian, lalu dibagi rata.

"Jadi misal ada 500 motor sehari, penghasilan dari jumlah segitu dibagi jukir yang bekerja sesuai shift. Tapi saya belum tahu sistem pemberian upahnya bagaimana," tutur Kamidi. (gll/rfk)

BEBAS RETRIBUSI

● Sultan minta Wali kota menginisiasi adanya koperasi untuk para Jukir di Abu Bakar Ali

● Gubernur juga minta Pemkot mencari alternatif lokasi lain untuk memenuhi kebutuhan lahan parkir seluas 30 ribu meter persegi

● Jukir di Abu Bakar Ali akan diberikan kompensasi Rp 50 ribu per orang per hari selama dua bulan

● Pemkot juga membebaskan retribusi parkir di Abu Bakar Ali selama enam bulan

● Seluruh penghasilan parkir di Abu Bakar Ali akan dibagi rata untuk seluruh jukir.

● Sejak ada relokasi parkir, pengusaha di Malioboro mengaku ada penurunan omzet dan tingkat kunjungan sebesar 20-30 %